



Buletin Parlamentaria

Nomor 1026/IV/IX/2018 • September 2018



Soliditas MIKTA Hadapi Tantangan Global



9 772614 339005

Parlemen Remaja Kenalkan Politik pada Generasi Muda

Soliditas MIKTA Hadapi Tantangan Global

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan saat ini bangsa-bangsa di dunia tengah menghadapi sejumlah masalah yang harus dicarikan jalan keluar bersama. Tantangan yang ada mulai dari keamanan global, ketidakpastian ekonomi, tantangan sosio-kultural hingga degradasi lingkungan. Tantangan global ini membuat MIKTA perlu mengambil upaya kolektif yang lebih kuat melalui kemitraan yang inklusif.

Melihat hal itu, Indonesia sebagai Koordinator MIKTA tahun 2018 menjadi tuan rumah pertemuan parlemen negara MIKTA dengan mengusung tema “Mewujudkan Perdamaian dan Kesejahteraan: Peran Parlemen”. Pertemuan yang berlangsung pada 15-17 September 2018 ini dimaksudkan untuk memastikan peran parlemen dalam menyusun kebijakan dan rencana aksi yang mengarah pada perdamaian dan kesejahteraan global.

Tantangan global ini membuat negara yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia) perlu mengambil upaya kolektif lebih kuat untuk mewujudkan kemitraan yang lebih inklusif antar para pemangku kepentingan. Kemitraan yang setara antara laki-laki dan perempuan, antar pebisnis, komunitas, parlemen, dan pemerintah negara anggota MIKTA,” ujar Bamsuet, sapaan akrabnya, saat menutup forum konsultatif MIKTA ke-4, di Istana Kepresidenan Tampaksiring, Bali, Minggu (16/9).

MIKTA merupakan forum kemitraan antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. MIKTA dibentuk pada tahun 2013, bertujuan untuk mendukung pemerintah global yang efektif. Hadir dalam pertemuan ini tiga Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah, Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Hazrul Azwar, serta Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard.

Selanjutnya, Ketua Parlemen Korea Selatan Moon Her Sang didampingi dua anggota parlemen Korea Selatan Lee Soo Hyuck dan Ji Sang Wuk, Wakil

Presiden Senat Australia Sue Lines, Wakil Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop, dan Dubes Meksiko untuk Indonesia Armando Gonzalo Alvarez mewakili parlemen Meksiko yang tidak bisa hadir karena bertepatan dengan pembentukan parlemen baru di Meksiko.

Dalam forum ini, delegasi saling bertukar pikiran dan pandangan dalam berbagai isu seperti industri kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga perdamaian dan keamanan, memberdayakan PBB, peran perempuan dan keamanan serta kerja sama maritim untuk pertumbuhan dan kesejahteraan berkelanjutan.

Forum terbagi menjadi empat sesi membahas isu-isu yang relevan dengan tema utama sidang MIKTA. Sesi pertama membahas tema industri kreatif, sesi kedua membahas penjagaan perdamaian dan keamanan, sesi ketiga tentang peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, dan sesi terakhir membahas kerjasama maritim untuk kesejahteraan dan pertumbuhan berkelanjutan.

Pada diskusi sesi pertama yang dipimpin Parlemen Korea Selatan, MIKTA sepakat industri kreatif memiliki potensi nilai tambah untuk ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Inklusivitas adalah kunci untuk memajukan pertumbuhan, terutama pada masa ketika peluang kerja baru tercipta lewat pola pikir digital.

“Kita menyambut beragam inisiatif MIKTA untuk ekonomi yang lebih inklusif, seperti *MIKTA Experts Meeting on Inclusive Digital Economy Accelerator Hub and MIKTA Start Up Fest*. Kita juga menanti perhelatan berikutnya yakni *World Conference on Creative Economy* pada November 2018 di Indonesia,” sebut Bamsuet.



Sesi berikutnya, Parlemen Turki memimpin untuk membahas penjagaan perdamaian dan keamanan. Sesi ini merangkum perhatian parlemen negara anggota MIKTA terhadap kapasitas PBB dan Dewan Keamanan dalam mengatasi masalah perdamaian dan keamanan yang muncul di berbagai belahan dunia.

“Sebagai anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan komitmen dukungan MIKTA dalam memperkuat arsitektur PBB untuk perdamaian dan keamanan internasional. Terkait hal itu, proses reformasi dalam tubuh PBB, khususnya Dewan Keamanan, perlu terus dilakukan,” ujar Bamsuet.

Delegasi Australia memimpin sesi yang membahas mengenai peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan. MIKTA sepakat dalam perdamaian dan pencegahan konflik tidak boleh ada bias jender. MIKTA juga menggarisbawahi pentingnya



Foto bersama seluruh delegasi Forum Mikta ke-4 di Bali



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Sofyan Efendi
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,
Azka Restu Fadilah, Gerald Opie
ADMINISTRASI
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

Foto: Jayadi/mi

mewujudkan kerangka legislatif untuk tidak hanya melindungi dan mencegah perempuan menjadi korban konflik, tetapi juga melibatkan perempuan sebagai agen perdamaian dan keamanan berkelanjutan.

“Kita sepakat untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian dan penyelesaian konflik. Termasuk melalui peraturan keterlibatan perempuan di penjaga perdamaian, proses pembangunan perdamaian, peningkatan kepemimpinan perempuan, serta proses pengambilan keputusan,” papar Bamsoet.

DPR RI sebagai tuan rumah memimpin sesi keempat terkait kerja sama maritim untuk kesejahteraan dan pertumbuhan berkelanjutan. Parlemen MIKTA berkeyakinan bahwa laut menyediakan sumber daya luar biasa bagi kesejahteraan global.

“Kita prihatin dengan memburuknya sumber daya laut akibat penangkapan ikan yang berlebih dan pengasaman laut.

Kita telah menggarisbawahi pentingnya kerja sama kemaritiman antar negara anggota MIKTA. Kerjasama yang selain bermanfaat secara ekonomi, juga berkelanjutan untuk masa depan laut, planet dan generasi yang akan datang,” kata Bamsoet.

Menutup pertemuan, Bamsoet memberikan apresiasi yang tinggi dan berterima kasih kepada seluruh delegasi atas partisipasi aktif dan kontribusinya dalam forum konsultatif MIKTA 2018 di Bali. Pertemuan serupa diharapkan terus dilakukan untuk bersama membahas persoalan yang tengah dihadapi dunia.

“Kami berharap kerja sama ke depan akan terus terbangun, termasuk ketika Meksiko melanjutkan kepemimpinan MIKTA pada tahun 2019. Semoga pertemuan kali ini dapat menginspirasi parlemen untuk aksi-aksi keparlemenan dan legislatif di masa mendatang,” pungkas Bamsoet. ■

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen
DESAIN GRAFIS
Dito Sugito
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,
PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Foto: Gerardi/rni

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri *Focus Group Discussion* (FGD) bertema "Kemandirian Pangan Modal Pasar Ketahanan Nasional"

Kedaulatan Pangan Masih Dipertanyakan

Kedaulatan pangan yang sering didengungkan dan diimpikan masih menjadi pertanyaan besar di negeri ini. Persoalannya berkuat pada produksi, konsumsi, dan distribusi. Pemerintah kerap mengklaim ketersediaan pangan cukup, tapi di saat yang sama selalu ada impor pangan yang masif.

Demikian mengemuka dalam *Focus Group Discussion* (FGD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9). Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon hadir memberi sambutan pengantar dalam diskusi pertanian bertajuk "Kemandirian Pangan Modal Dasar Ketahanan Nasional". FGD ini merangkum masukan berharga bagi DPR RI soal perkembangan dunia pangan di Tanah Air.

Dalam sambutannya, politisi Partai Gerindra itu mengatakan, DPR RI membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya soal pertanian dan pangan untuk menyusun kebijakan. Kondisi

ketersediaan pangan terakhir sangat menentukan tingkat keamanan nasional. Semakin berdaulat di bidang pangan, stabilitas keamanan kian terjaga.

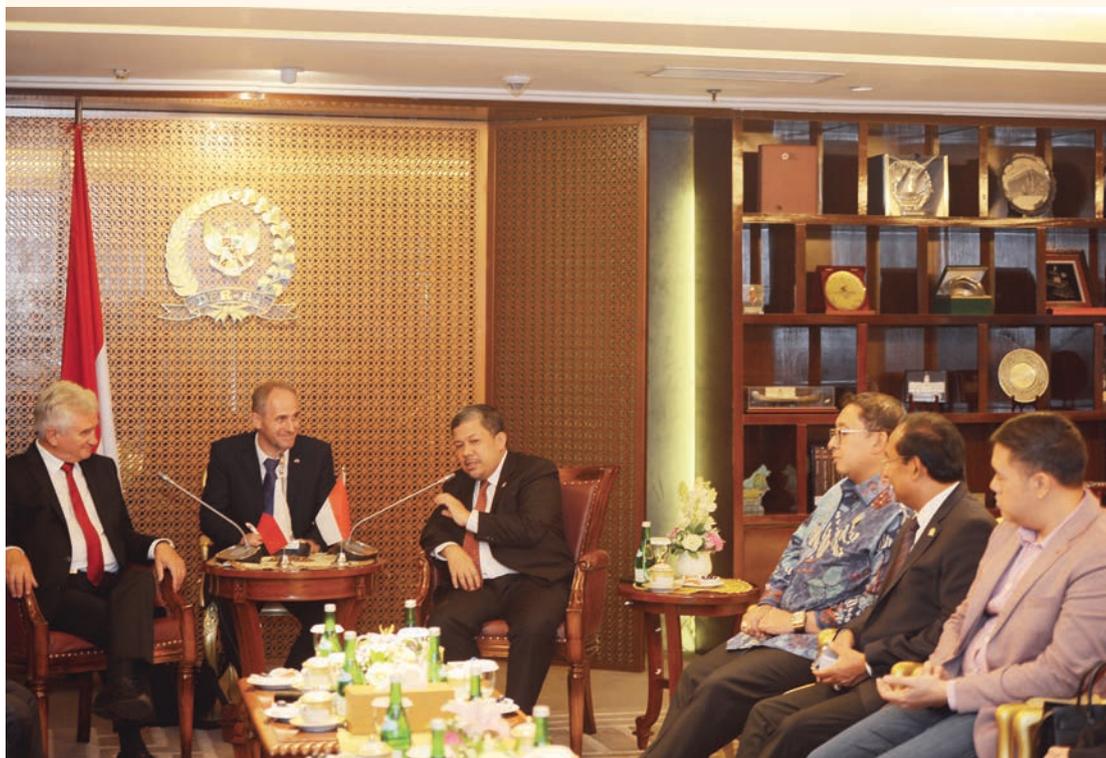
Di satu sisi pemerintah mengatakan cukup produksi, tapi di sisi lain selalu terjadi impor beras yang cukup masif. Ini jadi konsen kita semua. Begitu juga dengan informasi komoditas lain ditambah pelemahan rupiah

"Kita ingin melihat informasi yang berkembang, baik itu persoalan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Di satu sisi pemerintah mengatakan cukup produksi, tapi di sisi lain selalu terjadi impor beras yang cukup masif. Ini jadi konsen kita semua. Begitu juga dengan informasi komoditas lain ditambah pelemahan rupiah berdampak pada sektor pertanian, peternakan, dan lain-lain," ungkap Fadli.

Mohammad Jafar Hafsah yang menjadi salah satu pembicara menyatakan, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 masih disalahartikan. Pasal itu menyebut bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, ketika bicara 'kekayaan alam yang terkandung di dalamnya', maka langsung ditujukan pada kekayaan tambang. Yang ada di permukaan bumi pun harus diperhatikan. Itulah dunia pertanian yang juga ikut andil menyjahterakan masyarakat. ■ mh/sf

Parlemen Ceko Nilai Indonesia Konsisten Berdemokrasi



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat menerima delegasi Parlemen Ceko yang dipimpin Mila Stech di Gedung DPR RI

Foto: Andri/rni

Parlemen Ceko menilai Indonesia sangat konsisten berdemokrasi. Karena itulah, bekerja sama dengan Indonesia memberi jaminan stabilitas, karena ada *rule of law* yang mengaturnya. Di negara demokratis, transparansi dan keterbukaan dijunjung tinggi.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan hal itu usai menerima delegasi Parlemen Ceko yang dipimpin Milan Stech di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9). Turut hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha, dan sejumlah Anggota DPR RI.

Disampaikan Fahri, Ceko adalah negara di Eropa Timur yang memilih sistem demokrasi. Sementara Slovakia, negara pecahannya memilih sosialisme. Ceko dan Indonesia punya kesamaan sistem. Dengan sistem demokrasi, Ceko mampu menjadi salah satu negara terkaya di Eropa.

“Ceko negara Eropa Timur yang memilih sistem demokrasi. Mereka pecah. Slovakia memilih sosialisme dan Ceko memilih demokrasi. Dulu mereka pernah jaya, tapi kemudian setelah demokrasi, mereka bisa mengejar kemajuan kembali. Meskipun mekanisme pasarnya bebas tapi dalam jaminan sosial mereka relatif sosialistik. Itu mirip juga dengan kita,” jelas Fahri.

Ini adalah citra dan apresiasi besar dari Ceko terhadap Indonesia. Hanya persoalannya, kata Fahri, apa benar Indonesia sudah punya kepastian hukum. Ini yang harus dikonfirmasi kembali kepada pemerintah, agar mereka mau berinvestasi. Banyak kesamaan yang bisa dimanfaatkan untuk menjalin kerja sama bilateral.

“Pendiri bangsa kita juga jadi inspirator bagi mereka. Kesamaan ini bisa menjadi dasar kerja sama. Mereka mengatakan ingin meng-expand kerja sama di bidang ekonominya,” tambah Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Sebagai Presiden Senat Ceko, Milan juga menyampaikan, Ceko sempat menjadi sepuluh negara terkaya di Eropa. Setelah perang dunia ke-2, Ceko yang ketika

itu masih bernama Cekoslovakia masuk Eropa timur dan di bawah pengaruh Uni Soviet.

Kini, ketika pecah dengan Slovakia, Ceko mengejar kembali kejayaan ekonominya di masa monarki. Dengan sistem demokrasi yang diambil, Ceko kembali bangkit menjadi salah satu negara Eropa terkaya. Angka pengangguran hanya 2,5 persen dari jumlah penduduk. Itu pun lantaran tidak bisa bekerja lagi.

Ekonomi Ceko relatif liberal. Namun, jaminan sosial bagi warga negaranya sangat sosialistik. Asuransi kesehatan di Ceko merupakan yang terbaik di Eropa. Melihat fakta itu, Fahri menyatakan, dari sisi ekonomi memang liberal. Artinya, meminimalisir peran negara. “Kita sebagai negara yang sedang tumbuh bisa kerja sama dengan mereka. Seperti negara Eropa lainnya, mereka maju di bidang otomotif, teknologi, dan persenjataan,” imbuh Fahri lagi. ■ mh/sf

Program Pemantapan Nilai Kebangsaan Harus Sentuh Generasi Muda

Anggota Komisi I DPR RI Jerry Sambuaga mendorong agar program pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dapat disentuh oleh para generasi muda. Secara khusus memang selama ini program tersebut hanya ditujukan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat saja.

Alasan utamanya adalah agar sejak usia dini diharapkan anak-anak dapat menjauh dari radikalisme. Sehingga apabila pemantapan nilai kebangsaan ini diterapkan sejak usia dini, maka proses radikalisme yang kian merajalela dapat menghilang dari Indonesia.

“Saya usul untuk dilakukan pemantapan nilai kebangsaan dimulai sejak usia dini untuk meminimalisir maraknya proses radikalisme yang terjadi saat ini. Radikalisme harus kita musnahkan jauh-jauh tentunya karena

sangat mengkhawatirkan seluruh pihak,” tutur Jerry dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Lemhannas dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).

Minimal, menurut politisi Partai Golkar itu, dengan adanya penancapan isu-isu kebangsaan sejak usia dini dapat membuat generasi muda lebih memahami arti nasionalisme. Tentunya ia mendorong Lemhannas untuk menyajikan konten yang ringan untuk anak-anak.



Anggota Komisi I DPR RI Jerry Sambuaga

“Dengan menancapkan isu-isu kebangsaan sejak dini, diharapkan rasa nasionalis generasi muda kita tercipta sejak dini. Tentunya harus dibuatkan konten-konten yang ringan juga,” pungkask politisi dapil Sulawesi Utara tersebut. ■ eps/sf



Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hutauruk

“Kami minta kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bertanggung jawab atas temuan pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum 2019,” kata Rufinus

Banyak DPT Ganda, Legislator Duga Ada Human Error

Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk menduga adanya kesalahan *human error* terkait ditemukannya data pemilih ganda oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebanyak 10.798 di Batam, 8.862 di Tasikmalaya, 6.777 di Banyumas, serta 1.036 di Purwakarta.

ketika dihubungi *Parlementaria* melalui pesan singkat, Jumat (14/9).

KPU sendiri telah menetapkan DPT Pemilu 2019 sejak 5 September 2018. Dalam DPT tersebut terdapat 187.781.884 pemilih yang terdaftar. Jumlah itu terdiri dari 185.732.093 pemilih di dalam negeri dan 2.049.791 luar negeri. Meski DPT telah ditetapkan, KPU memiliki waktu perbaikan DPT selama 10 hari kerja setelah masa penetapan DPT. Dengan alasan, masih ditemukan jutaan pemilih ganda pada DPT Pemilu 2019.

Menurut politisi Fraksi Partai Hanura ini, tumpang tindihnya daftar pemilih tersebut memang bervariasi dan diperkirakan jumlah itu masih akan bertambah. Untuk itu, Komisi II DPR RI akan terus mendorong KPU agar cepat melakukan pencermatan ke lapangan, sebelum finalisasi DPT.

“Diharapkan KPU duduk bersama Bawaslu, dan partai politik dari tingkat daerah sampai pusat dalam melakukan pengecekan dan pencermatan,” saran legislator dapil Sumatera Utara ini. ■ es/sf

Komisi V Akan Mediasi Sengketa Pelabuhan Patimban



Fotolwan Armanias/rni

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis saat memimpin RDPU dengan Paguyuban Tani Berkah Jaya Desa Kalentambo dan Desa Patimban

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis memastikan, pihaknya akan membantu mediasi masyarakat Desa Kalentambo dan Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan pemerintah daerah terkait masalah ganti rugi lahan warga yang belum terealisasi, dalam rangka pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban.

Padahal dalam pertemuan itu terungkap, warga secara jelas mendukung penuh pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Mereka hanya meminta keadilan agar apa yang menjadi haknya bisa didapatkan.

“Saya sempat menegaskan, dan seluruh audiens menyatakan mendukung terhadap pembangunan pelabuhan itu, karena menyangkut hajat hidup mereka juga. Mereka hanya ingin hak mereka terpenuhi itu saja,” ujar Fary usai rapat dengan Paguyuban Tani Berkah Jaya Desa Kalentambo dan Desa Patimban,

di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9).

Politisi Partai Gerindra tersebut berjanji, pihaknya akan secepatnya melakukan tinjauan ke Subang untuk melihat langsung bagaimana proyek pelabuhan itu berjalan, serta mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah sengketa.

“Kami akan segera meninjau ke Subang, kemudian ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pemda di sana untuk melakukan tinjauan dan mengundang seluruh *stakeholder* serta tim khusus PSP3 IPB. Setelah itu harus dibuat keputusan. Untuk saat ini kita tidak bisa

beri keputusan,” tutur politisi dapi NTT itu.

Sebelumnya, Paguyuban Tani Berkah Jaya Desa Kalentambo dan Desa Patimban melaporkan kronologis dan membuat tuntutan kepada pemerintah daerah atas tidak jelasnya biaya kompensasi pembebasan lahan mereka yang digunakan untuk membangun Pelabuhan Internasional Patimban. Masyarakat ini juga meminta agar seluruh elemen masyarakat di sana dilibatkan dalam pembangunan dan dijanjikan dalam segala aspek pembangunan.

“Kami menderita Pak, mendapat intimidasi dari aparat. Padahal kami hanya ingin menuntut hak kami secara jelas. Kami ingin tahu AMDAL dari pembangunan ini. Jika memang ini akan meningkatkan ekonomi rakyat tentu akan kami dukung, tapi jika tidak, maka kami akan mencari keadilan,” tutur seorang juru bicara Paguyuban Tani Berkah Jaya saat audiensi. ■ eps/sf

Revisi UU MK Guna Perkuat Kelembagaan dan Tingkatkan Profesionalisme

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menjelaskan, DPR RI dan pemerintah sedang melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) atas revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dianggap sangat penting guna penguatan kelembagaan dan meningkatkan profesionalisme MK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

“Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara penjaga konstitusi (*the Guardian of the Constitution*), sebab setelah 15 tahun berjalan, disadari bersama bahwa terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan terkait tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi,” katanya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dalam “Diskusi Mengenai RUU MK” dengan akademisi dan praktisi hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (13/9).

Erma yang juga sebagai Ketua Panja RUU MK menerangkan, urgensi pembahasan RUU MK yaitu perlu dibentuk suatu UU yang mengatur mengenai MK yang lingkup pengaturannya antara lain mengatur mengenai pelaksanaan tugas

dan kewenangan hakim konstitusi terkait masa jabatan dan syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, kode etik hakim dan dewan etik hakim konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan tata beracara di MK, juga termasuk pengaturan mengenai kepaniteraan dan sekretariat jenderal sebagai *supporting system*.

Selain itu, belum adanya ketentuan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai hukum acara dan tata beracara di MK, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. “Beberapa mekanisme yang selama ini diatur pada tingkat Peraturan MK, dianggap perlu untuk diatur menjadi materi muatan UU, antara lain terkait persidangan dan rapat



Foto: Agung/rni

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik

Komisi IV Apresiasi Realisasi Penyaluran Rastra oleh Bulog



Foto: Azka/rni

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Waitimena (kanan) saat RDP dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso

Komisi IV DPR RI mengapresiasi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) atas realisasi penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) hingga bulan September 2018 sebesar 94,04 persen atau sekitar 958.873 ton dari surat perintah penyaluran (SPP) bulan September 2018 sebesar 1.019.614 Ton.

Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan jajarannya, di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).

“Di samping itu, kami juga meminta Perum Bulog untuk meningkatkan penyaluran Rastra pada bulan berikutnya

permusyawaratan hakim, putusan dan pasca putusan, menyangkut pengujian UU terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan lembaga negara dan perselisihan hasil pemilihan umum,” paparnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu menambahkan, perlu adanya perubahan kelembagaan MK sebagai jawaban atas permasalahan, utamanya menyangkut transparansi rekrutmen hakim, persyaratan calon hakim, serta pengawasan terhadap etika, perilaku dan independensi hakim konstitusi.

“Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya, sebab kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan satu-satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan harus senantiasa dijamin merdeka oleh konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” imbuh Erma.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Namun demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan yang demokratis,” tegas politisi Kalbar ini. ■ as/sf

dengan mengedepankan asa 6 Tepat yakni Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Mutu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena saat memimpin rapat.

Selain itu, Komisi IV DPR RI juga mendukung usulan Perum Bulog untuk mengalokasikan anggaran pengadaan dan penyaluran komoditi selain beras sebesar Rp 2,9 triliun sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Tidak hanya itu, Komisi IV DPR RI juga menyetujui usulan Perum Bulog untuk merelokasi anggaran program bantuan pangan non tunai (BPNT) tahun 2019 menjadi program Rastra (Natura) sebesar Rp 20,8 triliun dengan mempertimbangkan fungsi peran Bulog menstabilkan harga beras dan menyerap hasil panen petani. ■ ayu/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto bersalaman dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto

Foto: Rumi/rm

Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kemenperin

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2019 sebesar Rp3,589 triliun untuk disinkronisasi di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto selaku pimpinan Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menjelaskan, pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk 9 program.

Program itu meliputi program dukungan manajemen Kemenperin sebesar Rp269,589 miliar, program penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro sebesar Rp121,632 miliar, program penumbuhan dan pengembangan industri kimia, farmasi dan tekstil sebesar Rp123,079 miliar, program penumbuhan dan pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika sebesar Rp126 miliar.

Kemudian, program penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah dan aneka sebesar Rp379 miliar, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenperin Rp45 miliar, program pengembangan teknologi dan kebijakan industri sebesar Rp721 miliar, program peningkatan ketahanan, pengembangan perwakilan industri dan akses industri internasional sebesar Rp107 miliar, dan terakhir untuk program pengembangan SM industri sebesar Rp1,694 triliun.

Kemudian, dilanjutkan politisi Partai Golkar itu, pihaknya juga menerima usulan tambahan anggaran sebesar Rp434,500 miliar. “Usulan tambahan tersebut, dialokasikan untuk pengelolaan, kampanye serta promosi program kerja *Inisiatif Making Indonesia 4.0*,” tutur politisi dapil Jawa Tengah VIII itu.

Terakhir, pihaknya juga menyetujui usulan realokasi anggaran Kemenperin tahun 2018 dari alokasi pembangunan politeknik di Kawasan Industri Batulicin dan Kawasan Industri Dumai serta beberapa anggaran kegiatan sebesar Rp53,900 miliar.

“Alokasi anggaran itu guna mendukung implementasi *Making Indonesia 4.0* dan pengembangan kawasan industri di Teluk Bintuni melalui skema kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui kegiatan tata kelola KINAS dan Implementasi Inisiatif *Making Indonesia 4.0*,” imbuhnya.

Kemudian, pengadaan peralatan *Function Textile berbasis Industry 4.0* di Politeknik STT Bandung, Penyusunan *Final Business Case (FBC)* Kawasan Industri Teluk Bintuni, Pengembangan *Show Case Food & Beverage Digital Plant berbasis Industry 4.0* dan *Scoping study Industri 4.0*. ■ rnm/sf

Komisi X Minta Pemerintah Tak Samakan PTN-BH dengan BUMN

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto menyampaikan, pihaknya mendukung penuh perguruan tinggi di Indonesia, khususnya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) untuk masuk dalam jajaran *Top 500 World Class University*. Untuk itu, ia meminta pemerintah tidak menyamakan pengelolaan keuangan PTN-BH dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), agar PTN-BH dapat mengembangkan aset baik akademik ataupun non akademik untuk menjadi *world class university*.

Hal ini ia sampaikan ketika memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panitia Kerja (Panja) Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI ke Universitas Airlangga

Tapi kalau investasinya sudah diterima, ya jangan dialihkan ke tempat yang lain,” kata Djoko.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, perlu adanya aturan atau regulasi yang tidak terlalu mengikat

kepada PTN-BH, jika negara ingin serius membuat PTN-BH yang ada di Indonesia menjadi *world class university*. Hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini dosen-dosennya harus berkualitas.

“Dan yang kedua, sarana dan prasarananya terutama di bidang riset. Karena kita ini sangat kecil sekali anggaran di riset. Kalau kita mau mencapai itu, benahi dulu tenaga pengajarnya, sarana prasarananya, dan kesiapan pada universitasnya secara kelembagaan. Dan akreditasinya semua harus diatas A,” tegas Djoko.

Terkait usulan untuk adanya lisensi mengajar untuk tenaga

pengajar di Indonesia, ia berpendapat saat ini usulan lisensi mengajar belum bisa diterapkan. Perlu ada kajian secara mendalam, mengingat saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga pengajar. Sehingga jika aturan lisensi diterapkan, maka Indonesia akan semakin kekurangan tenaga pengajar.

Namun politisi dapil Jawa Tengah itu menekankan, untuk tahap pertama sertifikasi kompetensi mengajar dinilai sudah cukup dan mendorong para pengajar untuk bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi, sehingga mampu mencetak generasi yang bisa membawa Tanah Air menjadi lebih baik.

“Mestinya untuk tahap pertama itu sertifikasi saja cukup, karena belum semua dosen-dosen kita bersertifikat.

Tapi yang paling penting adalah kita harus menyiapkan dosen-dosen yang berkualitas. Beri pendidikan yang baik, beri beasiswa kepada mereka untuk pendidikan di luar negeri. Kalau masalah tuntutan untuk lisensi mengajar, sertifikasi mengajar sudah cukup dulu,” tutup Djoko. ■ nap/sf



Foto: Tasya/rni

Tim Kunspek Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI di Universitas Airlangga

(Unair), Surabaya, Jawa Timur (13/9).

“Jadi perlu ditekankan, PTN itu bukanlah *profit center*, ini adalah lembaga pendidikan yang berbadan hukum, jadi jangan disamakan dengan BUMN. Kita ingin keuangannya dikelola secara profesional, sehingga bisa menarik investasi ke dunia pendidikan.

Sarana dan prasarananya terutama di bidang riset. Karena kita ini sangat kecil sekali anggaran di riset

Penguatan Kelembagaan MK Sangat Penting

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menjelaskan, DPR RI dan pemerintah sedang melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK). Ia menjelaskan, pembahasan RUU MK ini sangat penting, guna memberikan penguatan kelembagaan pada MK.

lembaga negara dan perselisihan hasil pemilihan umum.

“Perlu adanya perubahan kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai jawaban atas permasalahan. Utamanya menyangkut transparansi rekrutmen hakim, persyaratan calon hakim, dan pengawasan terhadap etika, perilaku dan independensi hakim konstitusi,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Desmond memaparkan, besarnya kewenangan MK dari luasnya dampak dari suatu putusan MK menjadi alasan tersedianya sembilan orang negarawan

Hal itu diungkapkan Desmond saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi III DPR RI berdiskusi dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalsel, Akademisi dan Praktisi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan, dan Peradi Banjarmasin, di Gedung Kanwil Kemenkum HAM Kalsel, Banjarmasin, Selasa (18/9).

“Pembahasan RUU MK ini sangat penting guna penguatan kelembagaan serta meningkatkan profesionalisme MK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), Setelah 15 tahun berjalan terdapat hal hal yang perlu disempurnakan terkait tugas dan fungsi MK,” jelas Desmond.

Ia menerangkan, urgensi pembahasan RUU MK yaitu perlu dibentuk UU yang mengatur mengenai MK, yang ruang lingkup pengaturannya antara lain mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan, hakim konstitusi terkait masa jabatan dan syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, kode etik hakim dan dewan etik hakim konstitusi, hukum acara MK dan tata beracara di MK. Termasuk pengaturan mengenai kepaniteraan dan sekretariat jenderal sebagai *supporting system*.

Lebih lanjut Desmond menjelaskan, belum adanya ketentuan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai hukum acara dan tata beracara di MK, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Beberapa



Foto: Eka Hindra/rni

Tim Kunspek Komisi III DPR RI berfoto bersama Kopolda Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Kalsel, dan sejumlah mitra

mekanisme yang selama ini diatur pada tingkat Peraturan MK, dianggap perlu diatur menjadi materi muatan UU, antara lain terkait persidangan dan rapat permusyawaratan hakim, putusan dan pasca putusan, menyangkut pengujian UU terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan

berintegritas dan berkepribadian tidak tercela yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagai Hakim Konstitusi secara berkelanjutan, merupakan hal mutlak dalam mewujudkan supremasi konstitusi di Indonesia. Sehingga proses tersebut memerlukan syarat dan mekanisme yang sangat selektif.

“Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan RUU ini adalah menjamin kepastian hukum bagi para hakim Mahkamah Konstitusi dan meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selain itu, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menghilangkan persepsi *judiciary corruption* terhadap peradilan konstitusi,” harap politisi dapil Banten itu. ■ hr/sf

urgensi pembahasan RUU MK yaitu perlu dibentuk UU yang mengatur mengenai MK, ruang lingkupnya antara lain mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan.

BAKN Dorong Pembentukan Implementasi BOS

Hasil audit pengawasan dan pemaparan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai akuntabilitas dana transfer ke daerah yang terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Provinsi Maluku Utara, menyatakan perlu ada pembetulan dan penyempurnaan lagi terhadap pengimplementasian Dana BOS.



Wakil Ketua BAKN DPR RI Willgo Zainar (kanan) memimpin Tim Kunker BAKN ke Maluku Utara

Foto: Cuntur/ri

20 persen di kabupaten-kabupaten di luar Ternate. Jika dirata-ratakan, implementasinya menjadi 63 persen.

“Rekomendasi ini akan terus ditindaklanjuti. Kami berharap bisa menjadi 100 persen tahun depan. Bila komitmen bersama ini terus kita jaga mulai dari pengelolaan SDM, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi, dan termasuk payung regulasinya juga mesti kita sama-sama rapikan kembali,” dorong politisi Dapil NTB ini.

Sementara itu, Anggota BAKN Achmad Hatari menilai, Maluku Utara pernah menjadi perbincangan nasional karena lemahnya tata kelola pemerintahan. Untuk itu, ia mengajak seluruh aparat pemerintah, mulai dari gubernur, walikota dan bupati, serta instansi-instansi terkait untuk berkomitmen bersama dan melakukan pembetulan di seluruh wilayah Maluku Utara.

“DPR mempunyai fungsi penganggaran dan fungsi kontrol terhadap tata kelola keuangan pemerintah. Makanya BAKN akan terus berupaya mengontrol dan memberikan rekomendasi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Dana BOS di Maluku Utara agar tiap tahun mendapat opini BPK yang wajar tanpa pengecualian dari BPK,” jelas politisi Nasdem itu.

Hatari melihat permasalahan utama terhadap pengelolaan dana BOS tersebut terangkum dalam tiga permasalahan utama yaitu, pemerintah kabupaten atau kota belum mengalokasikan alokasi dana BOS dalam APBD maupun APBD-P, kemudian mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS belum diatur secara jelas, dan penyampaian laporan atas penggunaan Dana BOS yang belum tertib.

“Waktu, sasaran, dan alokasi pengelolaan Dana BOS ini menjadi hal yang terintegrasi ke depannya. Ini menjadi harapan kita kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas untuk memformulasikan Dana BOS, sehingga mudah untuk diterjemahkan ke bawah dan tidak simpang siur. Saya kira banyak hal yang menjadi substansi dan produktivitas, yang akan kita tindaklanjuti terhadap ketiga kementerian tersebut,” tandas politisi dapil Maluku Utara ini. ■ **gd/sf**

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) BAKN ke Provinsi Maluku Utara menyatakan, penyaluran dan pertanggungjawaban Dana BOS ini tetap satu bagian yang sama penting dan tidak terpisah dari proses pengelolaan, agar tercapai maksud serta tujuan pemberian Dana BOS ini sesuai amanat undang-undang.

“Memang ditemui dua masalah besar pengelolaan Dana BOS. Kita bisa kategorikan masalah ini menjadi dua bagian. Pertama adalah masalah

di tingkat daerah, dan kedua adalah masalah regulasi di tingkat pusat. Ini mesti sama-sama mesti cepat diperbaiki,” kata Willgo saat pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara dan SKPD terkait, serta BPK Perwakilan Maluku Utara, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Maluku Utara, Ternate, Kamis (13/9).

Politisi Gerindra ini melihat bahwa BPK sudah melaksanakan fungsinya dengan baik, dengan memberikan beberapa rekomendasi atas telaahan hasil pemeriksaan yang memang ada progresnya sampai 90 persen seperti di Ternate. Tetapi ada juga implementasinya yang masih sekitar

Komisi X Dukung PTN-Satker Tingkatkan Akreditasi

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mendukung penuh perguruan tinggi di Indonesia, khususnya Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker) untuk meningkatkan akreditasinya. Untuk itu, ia meminta pemerintah tidak menyamakan standarisasi akreditasi secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia.



Tim Kunspek Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi ke UNIMA di Sulut

Demikian dikatakan Nuroji saat pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dengan civitas akademika Universitas Negeri Manado, di Bukit Tosaru Tataran, Tondano, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis, (13/9). Kunspek ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

“Jadi perlu adanya terobosan, akreditasi didasarkan pada pembagian wilayah yang ada di Indonesia seperti Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Jadi jangan disamakan dengan universitas yang ada di Pulau Jawa. Sehingga, kriteria penilaian dan pendanaan keuangannya bisa disesuaikan dengan karakteristik

pembagian wilayah masing-masing,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Nuroji menjelaskan, mengenai akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan standar nasional pendidikan tinggi, tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan lembaga akreditasi mandiri sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sistem penilaian akreditasi perguruan tinggi didasarkan pada aspek

misi penyelenggaraan dan tata kelola perguruan tinggi, aspek misi dibagi menjadi dua, yaitu akademik dan vokasi, sementara pada aspek tata kelola dibagi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Lebih lanjut ia menjelaskan, kenyataan yang terjadi atas pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi adalah kemampuan mayoritas perguruan tinggi di Indonesia dalam memenuhi standar nasional Dikti tidak merata, banyak diantaranya bahkan masih sulit untuk mencapai standar maksimal. Hingga saat ini dari 4.455 perguruan tinggi di Indonesia, hanya sekitar 4 persen saja yang mampu meraih akreditasi A.

Nuroji menambahkan, perlu adanya aturan atau regulasi yang tidak terlalu mengikat kepada PTN, jika negara ini serius ingin membuat PTN yang ada di Indonesia menjadi *world class university*. Hal yang perlu dipersiapkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini dosen-dosenya harus berkualitas dan sarana prasarannya terutama di bidang riset.

“Karena kita ini sangat kecil sekali anggaran di riset. Kalau kita mau mencapai itu, benahi dulu tenaga pengajarnya, sarana prasarannya, dan kesiapan pada universitasnya secara kelembagaan” tegas politisi dapil Jawa Barat itu.

Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Manado (Unima) Julyeta P.A Lumentut-Runtuwene mengatakan, pihaknya sangat bersyukur menerima kunjungan Tim Kunspek Komisi X DPR RI. Pasalnya, dengan mengetahui kondisi perkembangan Unima, diharapkan DPR RI dapat memberikan berbagai pertimbangan kebijakan untuk kemajuan pendidikan di Unima dan umumnya untuk pendidikan nasional. ■

man/sf

Foto: Andri/rni

Perlu Tindakan Tegas terhadap Pencemaran Sungai Cileungsi

Pencemaran di Sungai Cileungsi dirasa sudah semakin meresahkan. Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai tersebut mengeluhkan adanya polusi bau yang dapat menyebabkan kondisi mual dan pusing. Berdasarkan pengaduan dari masyarakat itulah, Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian meminta agar pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mengambil tindakan tegas atas pencemaran yang terjadi itu.

“Terkait pencemaran Sungai Cileungsi, tindakan yang dilakukan KLHK dianggap (masyarakat) masih kurang tegas. Oleh sebab itu, mohon diberikan perhatian dan tindakan yang tegas dari Menteri LHK dan Dirjen yang terkait, karena kondisinya sudah sangat tercemar dan masyarakat merasa sangat dirugikan,” tandas Ramson saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, saat ini anggaran penegakkan hukum KLHK realisasinya baru mencapai 50 persen, jadi masih banyak anggaran untuk melakukan tindakan yang tegas



Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian

tanpa pandang bulu. “Kita sebagai wakil rakyat dan berjuang untuk rakyat. Tolong hal ini betul-betul diperhatikan, supaya anggaran untuk penindakan hukum itu bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Sungai Cileungsi yang berwarna hitam dan berbau menyengat itu diduga tercemar pembuangan limbah industri dari pabrik yang ada di sepanjang sungai. Kecurigaan masyarakat bertambah setelah ditemukan pipa di tengah sungai yang mengeluarkan air berwarna hitam pekat. Pipa tersebut ditemukan oleh warga, petugas KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor yang tengah melakukan penelusuran.

Dari pantauan di lapangan, pipa berdiameter sekitar 70 sentimeter itu sengaja dibeton di dasar sungai hingga bentuknya pun tak terlihat jelas. Meskipun masyarakat di sekitar Sungai Cileungsi tidak menggunakan air sungai secara langsung, namun kabarnya aliran sungai itu biasa dijadikan air baku untuk pengolahan air milik Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi. ■ dep/sf

Komisi IX Usulkan Pemerintah Gelar Sidang Kabinet Bahas Defisit BPJS Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning geram dengan ulah para pembantu Presiden yang tidak serius menangani program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pasalnya defisit pada arus kas BPJS Kesehatan mencapai Rp 16,5 triliun. Tentunya ini menghambat program KIS yang menjadi unggulan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Secara tegas Ribka mengusulkan agar Pemerintah menggelar sidang kabinet khusus untuk mengatasi permasalahan defisit BPJS Kesehatan ini.

“Perlu ada sidang kabinet khusus tentang BPJS Kesehatan. Harus berani ngomong di situ, *leading sector*-nya Menteri Kesehatan, didukung oleh Menteri Keuangan,” tegas Ribka saat Rapat Kerja dengan

Dirut BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan dan Ketua DJSN yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9).

Menurut Ribka, untuk mengatasi defisit anggaran tersebut, BPJS Kesehatan harus segera mengambil langkah nyata dan konkret. “Usulan konkret saja, Komisi IX nanti *bikin* surat khusus saja ke Presiden Jokowi. Karena saya sudah sering



Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning

Faktor Manusia Dinilai Dominasi Penyebab Karhutla

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, faktor manusia menjadi dominasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Banyak warga yang sengaja membakar lahannya, karena merupakan salah satu solusi tercepat untuk segera bercocok tanam. Walaupun faktor cuaca juga menjadi penyebab kebakaran, namun persentasenya kecil dibandingkan dengan faktor manusia.

Hal itu diungkapkan Marwan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR RI mengunjungi Kantor Posko Karhutla, Badan Penanggulangan



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memberikan sambutan saat Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Sumsel

Foto: Jayadi/rni

Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, Sabtu (15/9). Kunspek ini guna berdiskusi terkait pencegahan bencana karhutla Kota Palembang.

“Setelah kita berdiskusi, ternyata kita tahu bahwa faktor ekonomi masyarakat yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran yang ada di Kota Palembang ini. Mereka membakar untuk membuka lahan agar bisa bercocok tanam. Pemerintah harus hadir untuk mengadvokasi ekonomi masyarakat,” ujar Marwan, usai berdiskusi dengan jajaran BPBD

Sumsel.

Politisi PKB itu berpendapat, pendekatan serta pembinaan ekonomi masyarakat dipandang sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk menekan angka kebakaran lahan dibandingkan proses pemadaman yang dilakukan oleh Satuan Petugas (Satgas).

“Biaya yang dikeluarkan untuk sekali terbang ini tidaklah sedikit. Seharusnya biayanya bisa dialihkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi nantinya kami akan melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk menghitung biaya ekonominya,” kata politisi dapil Sumatera Utara itu.

Marwan berharap masalah ini dapat segera diatasi, agar kebakaran tidak terulang lagi. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait program pendekatan ekonomi. Karena pada prinsipnya, DPR RI juga ingin membantu perekonomian para petani dan juga mengedukasi masyarakat agar dapat merawat lahannya masing-masing. ■ jay/sf

sampaikan ke Saudara Menteri Kesehatan. Usulnya, ini kan BPJS program unggulan Pemerintah Jokowi,” tandas Ribka.

Ia menambahkan, jangan sampai pemberian KIS kepada rakyat oleh pemerintah sia-sia, karena para penyelenggara program tidak serius menjalankan program unggulan Pemerintahan Joko Widodo. Berdasarkan temuannya, banyak pasien yang membawa KIS ke rumah sakit, namun ditolak karena tidak ada dokter ataupun obat yang tersedia.

“Percuma Jokowi bagi-bagi KIS ke mana-mana, tapi KIS tak laku di rumah sakit. Tak dilayani sama dokter, karena dokternya tak bisa dibayar, obatnya tak ada. Jadi KIS yang diberikan Jokowi itu tak laku. Percuma,” sesal politisi Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini.

Bagi Ribka urusan kesehatan sangat penting, mengingat BPJS Kesehatan berkaitan langsung dengan hajat rakyat. “Ini urusan rakyat, jangan main-main. Kita enggak mau bolak-balik rapat dan dengar ada rumah sakit yang belum dibayar,” cetus Ribka.

Ia juga menyoroti masalah birokrasi dalam tubuh BPJS Kesehatan yang sangat berbelit-belit, membuat pusing warga. Rakyat sudah pusing dengan masalah penyakit ditambah lagi dengan birokrasi yang berbelit-belit, tentu menambah derita rakyat. “Bagaimana solusinya? Harus ada rapat khusus, supaya enggak salah-salahan di kabinet sana,” ungkapnya.

Defisit BPJS Kesehatan telah menghambat proses penggunaan KIS. Ribka mencurigai adanya menteri yang ingin menghambat program Jokowi. Ia meminta kepada pihak yang terkait dana anggaran BPJS Kesehatan untuk segera merumuskan solusi jangka panjang mengatasi defisit. Karena temuannya itulah, ia curiga ada menteri yang berniat untuk menghambat jalannya program Jokowi.

“Jangan-jangan ada menteri yang ingin menggagalkan Presiden Jokowi. Karena Pak Jokowi ini sudah blusukan ke mana-mana dengan memberikan KIS,” pungkas Anggota Dewan daerah pemilihan Jawa Barat itu. ■ eko/sf

Komisi X Apresiasi Loncatan Akreditasi Unsyiah Aceh

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI ke Provinsi Aceh Marlinda Irwanti mengapresiasi capaian prestasi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Darussalam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang mendapatkan loncatan akreditasi, dari semula akreditasi C menjadi akreditasi A. Menurutnya, hal ini penting untuk bisa dicontoh untuk perguruan tinggi lainnya di Indonesia.



Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti

Marlinda mengungkapkan, ada faktor lain yang dimiliki Unsyiah, namun belum dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya di Indonesia, yaitu *leadership*. Marlinda menjelaskan, pada tahun 2013 Unsyiah akreditasinya masih C, kemudian pada tahun 2015 mendapat akreditasi A. Selain adanya peran *leadership*, rektor juga memiliki peran penting dalam mengajak seluruh dosen dan tenaga pendidik lainnya untuk bekerjasama menggapai nilai akreditasi tersebut.

Hal lainnya juga karena mendapatkan kucuran dana dari *Islamic Development Bank* (IDB) berjumlah 3 juta dolar Amerika Serikat. Berkat adanya bantuan dana tersebut, akhirnya Unsyiah dapat meningkatkan akreditasinya menjadi A. Mengingat salah satu kendala terpenting dalam meningkatkan akreditasi institusi adalah dana yang nantinya akan digunakan untuk menambah sejumlah sarana prasarana, dan pelatihan sumber daya manusianya.

“Mendapatkan bantuan untuk kelembagaan yaitu berupa peralatan, pembangunan sarana prasarana, dan pelatihan SDM. Sebenarnya bantuan perguruan tinggi tidak hanya melalui APBN atau APBD, tapi juga bisa melalui lembaga-lembaga donor lain dari luar negeri. Melalui Kemenristekdikti Unsyiah mendapatkan 3 juta dolar dari IDB Loan. Itu luar biasa, dan akhirnya C menjadi A,” kata Marlinda saat pertemuan dengan jajaran rektor, pengajar, pendidik dan mahasiswa Unsyiah dan perguruan tinggi lainnya di ruang rapat rektorat Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Kamis (13/9).

Marlinda berharap dan mengajak perguruan tinggi lainnya yang masih memiliki akreditasi C nantinya dibantu oleh Komisi X DPR RI, agar mendapat bantuan dari donatur luar negeri

melalui Kemenristekdikti. Dan tentunya mendapatkan pelatihan-pelatihan pengelolaan perguruan tinggi dengan baik. Mengingat ada indikator pencapaian untuk mengubah dari akreditasi C ke B, dan seterusnya. Selain sarana prasarana, rasio dosen dan mahasiswanya juga harus diperhitungkan, yang terpenting adalah kejelasan kepemilikan lahan dari perguruan tinggi tersebut.

Marlinda, menjelaskan kunjungan Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI ke Aceh adalah untuk melihat permasalahan secara langsung dan mendasar terkait persoalan akreditasi prodi dan akreditasi institusinya. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat dari jumlah 4 ribu lebih perguruan tinggi di Indonesia, hanya sekitar 4 persen yang institusinya memiliki akreditasi A, dan ribuan lainnya yang akreditasi prodi dan perguruan tingginya masih C.

Bahkan, tambah Politisi Partai Golkar itu, ada banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta yang belum memiliki akreditasi. Parahnya lagi menurut informasi terkini, ada sekitar 600 lebih perguruan tinggi swasta yang dilakukan penutupan atau *merger* karena tidak memiliki akreditasi, baik akreditasi prodi maupun institusinya.

“Mengapa ini sangat penting, karena lulusan-lulusan sarjana sekarang yang akan dipertanyakan oleh institusi saat melamar kerja nanti adalah akreditasi institusi serta prodinya. Ini sangat penting. Menurut saya, sudah tidak ada lagi sekarang seharusnya perguruan tinggi yang tidak punya akreditasi, apalagi prodinya tidak terakreditasi. Komisi X DPR RI memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk menutup atau *me-merger* perguruan tinggi yang tidak memiliki akreditasi,” ungkapnya.

Politisi dapil Jawa Tengah itu menambahkan, tujuan Komisi X DPR RI membentuk Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi adalah untuk dapat meng-cover perguruan tinggi yang belum memiliki akreditasi, untuk dibantu meningkatkan akreditasinya, bahkan hingga mendapatkan akreditasi internasional.

Turut hadir dalam Kunspek Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI ke Provinsi Aceh diantaranya Anggota Komisi X DPR RI Mudjib Rohmat (F-PG), Anwar Idris (F-PPP), Iwan Kurniawan (F-Gerindra) dan Mustafa Kamal (F-PKS). ■ ndy/sf

Sepuluh Fraksi di DPR RI menyetujui secara aklamasi setelah melakukan harmonisasi dalam rapat yang dipimpin Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas didampingi Wakil Ketua Baleg DPR RI Sarmuji di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).

Supratman mengatakan, kehadiran RUU Peksos akan memberikan kepastian hukum. Dengan adanya RUU Peksos, maka status pekerja sosial akan jelas, termasuk jaminan kesejahteraan. “RUU ini memberi landasan pijakan hukum terhadap profesi pekerja sosial yang selama ini sudah ada, tetapi pijakan hukumnya belum ada,” papar Supratman.

Ia menuturkan, selain memberikan legitimasi, dengan adanya RUU ini, maka pekerja sosial akan diatur secara profesional melalui proses sertifikasi atau uji kompetensi. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar ada perbedaan yang jelas antara peksos dan *volunteer*, sehingga efektif dan tepat sasaran. Secara teknis, uji kompetensi akan dilakukan oleh



Banyak Kepala Desa Keluhkan Pengelolaan Dana Desa

Tujuan pemerintah mengucurkan Dana Desa pada prinsipnya untuk meningkatkan kesejahteraan, perekonomian dan pemerataan pembangunan desa. Namun seiring berjalannya waktu, tak sedikit pula kepala desa yang mengeluh dalam pengelolaan Dana Desa ini. Anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal mengaku cukup terkejut dengan isu yang beredar di kalangan kepala desa terkait permintaan pengembalian Dana Desa ke pusat.

“Silakan bangun sendiri oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah mau bangun apa, silakan saja. Daripada kami menanggung risikonya,” kata Jon Erizal seraya menirukan ungkapan keluhan dari kepala desa dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Deputi Senior Bank Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

Yang menjadi dasar keluhan kepala desa diantaranya adalah permasalahan administrasi terkait perencanaan dan pelaporan yang masih rumit serta petugas pendamping yang



Anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal

belum mumpuni. Terlebih lagi setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2017.

“Mereka sudah berjalan dalam tahun anggaran yang ada, tiba-tiba ada SKB 4 menteri yang mengharuskan dengan aturan-aturan tertentu. Ini mereka merasa terjebak, dan ini juga harus ada solusinya,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ia berharap jangan sampai niat yang mulia dari pemerintah ini, dianggap sebagai jebakan kepada kepala desa. Karena kegiatan Dana Desa ini dipantau oleh banyak lembaga. “Mereka diawasi Kejaksaan, Kepolisian sehingga menimbulkan keresahan dan merasa tidak tenang. Kemarin di Riau mereka menyampaikan surat resmi agar bisa diundang untuk hadir di Komisi XI. Ini perlu mendapat perhatian serius,” pungkas politisi dapil Riau itu. ■ es

Foto: Jaka/rni

Baleg Setujui RUU Peksos Jadi Usul Inisiatif DPR

Rapat Pleno Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dengan agenda pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pekerjaan Sosial (Peksos) menyetujui RUU ini menjadi usul inisiatif DPR RI, dan akan dilanjutkan ke Rapat Paripurna.



Sepuluh Fraksi DPR RI beserta pengusul menandatangani persetujuan RUU Peksos menjadi usul inisiatif DPR RI

lembaga pendidikan tinggi bersama organisasi yang membidangi profesi pekerja sosial.

“Selanjutnya, kualifikasi orang yang bisa bekerja dalam pengangkatan pekerja sosial harus menjadi lulusan sarjana pekerja sosial, karena memang ini sebuah profesi atau skill harus terpenuhi. Sehingga RUU ini sangat urgen untuk menampung pekerja sosial yang selama ini belum terlembagakan,” tandas politisi Partai Gerindra itu.

Selaku pengusul RUU, Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Fauzan mengatakan, RUU Peksos berupaya memberikan payung hukum agar pekerja sosial mendapat perlindungan dari negara. Tujuannya, agar pekerja sosial dapat diakui sebagai profesi profesional selayaknya di negara lain.

“Kita sudah tertinggal jauh dari negara lain, sehingga memang diperlukan kehadiran negara, apalagi semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial yang ada saat ini,” sambung politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

■ ann/sf

Foto: Rumi/rni



Foto: Kresno/rmi

Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan pejabat Setjen dan BK DPR RI berfoto bersama peserta Parlemen Remaja 2018 di Wisma Griya Sabha DPR RI

Parlemen Remaja Kenalkan Politik pada Generasi Muda

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, Parlemen Remaja 2018 yang mengusung tema “Pemuda di Persimpangan Teknologi Informasi” mengajarkan kepada generasi muda untuk menggunakan teknologi secara benar, dan mengajak generasi muda untuk mengenal politik lebih dalam, sehingga berguna bagi bangsa dan negara.

“ Dengan mengikuti acara Parlemen Remaja tahun ini, diharapkan generasi muda dapat menggunakan teknologi secara benar. Acara ini juga mengajak generasi muda untuk mengenal

politik lebih dalam, sehingga menghasilkan generasi penerus yang lebih baik,” ungkap Indra dalam pembukaan Parlemen Remaja 2018 di Wisma Griya Sabha DPR RI, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/9).

Indra berharap, seluruh peserta mengikuti acara Parlemen Remaja sebaik-baiknya, sehingga memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih luas terhadap kinerja Parlemen. Tujuannya, dapat menjadikan para peserta sebagai calon

legislator yang jauh lebih baik.

“Tentunya saya berharap agar peserta mengikuti acara ini sebaik-baiknya, sehingga nantinya mereka memiliki bekal yang cukup untuk menjadi pemimpin bangsa. Salah satunya bisa menjadi seorang legislator. Tentu itu yang kita harapkan,” pungkasnya.

Lebih lanjut Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan Badan Keahlian DPR RI Y.O.I Tahapari berpendapat, tema “Pemuda di Persimpangan Teknologi Informasi” disesuaikan dengan perkembangan zaman yang sudah mengandalkan teknologi informasi dalam bermacam hal.

“Tema ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Seperti yang kita ketahui teknologi, sudah sangat berpengaruh terhadap generasi muda dalam menjalankan segala aktifitasnya. Dengan acara Parlemen Remaja ini diharapkan akan menghasilkan pemuda yang bisa membangun bangsa melalui perkembangan teknologi dan informasi,” paparnya.

Parlemen Remaja digelar di Bogor dan Jakarta, pada 17-21 September 2018. Dari ribuan pendaftar, terpilih 124 peserta dari seluruh daerah pemilihan (dapil) di Indonesia.

Parlemen Remaja diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya simulasi rapat penyusunan undang-undang, simulasi rapat kerja dan rapat paripurna, simulasi kunjungan kerja, dinamika kelompok, hingga seminar yang mendatangkan sejumlah narasumber. ■ tn/sf

“Saya berharap peserta mengikuti acara ini sebaik-baiknya, sehingga nantinya mereka memiliki bekal yang cukup untuk menjadi pemimpin bangsa. Salah satunya bisa menjadi seorang legislator. Tentu itu yang kita harapkan”



Foto: Runi/rni

Irtama DPR RI Setyanta Nugraha menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Parlemen Thailand Sorasak Pienvej

Irtama DPR Terima Kunjungan Sekjen Parlemen Thailand

Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha didampingi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Rahaju Setya Wardani, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Nunu Nugraha Kuswara serta Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian Indra Pahlevi menerima kunjungan dari Sekretariat Jenderal Parlemen Thailand yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Parlemen Thailand Sorasak Pienvej.

“ Hubungan kerja sama Indonesia-Thailand sudah dimulai sejak lama. Kita berkewajiban untuk melanjutkan kerja sama yang telah dirintis oleh pendahulu kita,” kata Totok, sapaan akrabnya, saat menyambut delegasi Parlemen Thailand di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9). Totok mengatakan, kunjungan ini sebagai bentuk penguatan hubungan kerja sama dan juga merupakan pembaharuan sejarah hubungan Indonesia-Thailand yang sudah dimulai sejak tahun 1800-an. Ia juga menyampaikan bahwasanya pada gelaran Asian Games beberapa waktu lalu, Thailand menjadi negara pengutus delegasi ketiga terbesar setelah Indonesia dan China. “Sebanyak 812 delegasi Thailand yang berpartisipasi pada

perhelatan tersebut,” sambung Totok. Senada dengan yang disampaikan Totok, Sekjen Parlemen Thailand Sorasak Pienvej mengatakan bahwasanya tujuan kunjungan ini adalah untuk memperkuat hubungan Parlemen Thailand dengan Parlemen Indonesia. Ia juga menginginkan hubungan seperti ini terus bertahan selamanya. Sorasak menyampaikan kekagumannya ketika melihat luas area Kompleks DPR RI, sangat berbeda dengan Kompleks Parlemen Thailand. Ia pun berjanji akan mengundang DPR RI saat peresmian gedung Parlemen Thailand sekitar 3 tahun lagi. Tak lupa, Sorasak menyampaikan simpatinya, atas banyaknya korban jiwa dalam musibah gempa Lombok. ■ es/sf

Perempuan Didorong Jadi Agen Perdamaian Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menilai peranan perempuan perlu menjadi perhatian bersama. Perempuan dan anak-anak rentan menjadi sasaran dan target kekerasan. Namun, bukan berarti perempuan tidak bisa menjadi agen perdamaian dan resolusi konflik.

“Perempuan tidak hanya sekedar victims dari suatu konflik tetapi juga bisa menjadi agen perdamaian melalui pemberdayaan ekonomi dan pendidikan,” kata Nurhayati di sela-sela pertemuan ke-4 Parlemen MIKTA pada sesi ke-2 dengan tema “Peranan Perempuan dalam Perdamaian Dunia” yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan

hampir separuh dari penduduk dunia. “Kalau perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki, tidak termarginalkan dan bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki maka perempuan bisa menjadi agen dari perdamaian dunia,” jelasnya. Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, ada korelasi yang kuat

terhadap isu gender, sebagaimana merujuk pada *goals SDGs Leaving No One Behind*.

Kemudian, membuat diskusi kesetaraan gender yang juga melibatkan kaum laki-laki agar dapat berkontribusi lebih dalam melindungi hak-hak kaum perempuan yang setara, mencegah segala bentuk diskriminasi, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Indonesia sendiri, lanjutnya, terus berupaya melindungi terus berupaya melindungi dan memajukan hak-hak dan akses perempuan yang setara dan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Terbukti, Indonesia terbesar di Asia bahkan ke-12 di dunia dalam menjalankan operasi perdamaian dunia. Hal ini sejalan dengan komitmen MIKTA untuk meningkatkan kesetaraan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan dan pembangunan perdamaian.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Fadel Muhammad memanfaatkan momentum pertemuan MIKTA ini untuk mempromosikan produksi industri kreatif Indonesia ke dunia internasional. Sehingga forum ini menjadi bermanfaat menjadi ajang promosi karya anak bangsa guna menjalin kerja sama dengan negara lain.

“Secara spesifik bicara soal ekonomi kreatif, dimana ekonomi kreatif kita tumbuh hebat dan kita perlu masuk pasar di Korea, Turki, Meksiko dan Australia. Kami mendorong itu,” tutur politisi Partai Golkar ini di sela-sela pertemuan MIKTA.

Ia juga menjelaskan bahwa pertemuan MIKTA ini sangat besar manfaatnya bagi keberlangsungan

Indonesia ke depan. Terutama untuk memperlancar ekspor barang produksi Indonesia ke beberapa negara. Karena itu, melalui MIKTA, Indonesia mengajak untuk terus mengembangkan industri kreatif guna meningkatkan pendapatan negara. Karena potensi industri kreatif ini sangat besar di tengah era digitalisasi dan globalisasi. ■ ann/sf



Foto: Naefuroji/rni

Pimpinan DPR RI bersama Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf pada Forum MIKTA ke-4

Tampaksiring, Bali, Minggu (16/9).

Ditegaskan Nurhayati, perempuan mempunyai peranan krusial, sebab mampu membawa berbagai perubahan nyata, melalui peran aktif perempuan dalam dialog dan proses pengambilan keputusan di berbagai tatanan, mulai dari keluarga hingga komunitas. Apalagi, populasi perempuan di dunia

antar perananan perempuan dan perang maupun konflik. Di satu sisi, perempuan bisa menjadi pelaku atau berpengaruh dalam membentuk perilaku pola pikir suami.

Karena itu, dirinya mendorong negara MIKTA untuk terus meningkatkan partisipasi perempuan dan kesetaraan gender melalui kebijakan yang responsif



Wakil Ketua MKD DPR RI TB Soenmandjaja bersama Tim MKD menyerahkan bantuan kepada korban Gempa Lombok

MKD Serahkan Bantuan kepada Korban Gempa Lombok

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menunjukkan kepeduliannya atas musibah gempa bumi yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini dibuktikan dengan penyerahan bantuan berupa sembako dan tenda, guna mendukung sarana pengungsian yang anggarannya berasal dari sumbangan dari masing-masing anggota.

“ Hari ini MKD menyerahkan bantuan kepada korban gempa di Lombok. Mereka sekarang tinggal di pengungsian, akibat rumahnya roboh. Saya berharap bantuan ini bisa meringankan beban hidup mereka,” ungkap Wakil Ketua MKD DPR RI TB Soenmandjaja saat menyerahkan bantuan ke lokasi pengungsian di Narmada, Lombok Barat, NTB, Rabu (12/9).

Dalam kesempatan itu, sejumlah Anggota MKD DPR RI turut berbagi canda tawa dengan masyarakat terutama ibu-ibu dan anak-anak. Kehadiran MKD DPR RI ke lokasi pengungsian ini cukup mendapatkan antusiasme masyarakat. Soenmandjaja pun terus mendorong sinergi berbagai pihak, agar proses recovery bencana gempa di Lombok dapat segera diselesaikan.

“Saya juga berharap akan ada sinergi yang baik antara pemerintah, legislatif dan masyarakat sipil untuk proses pemulihan gempa ini dapat terselesaikan. Mari kita sama-sama bantu Lombok,” tutur politisi PKS ini. Saat menyerahkan bantuan, banyak masyarakat yang gembira dan cukup senang. Mengingat lokasi pengungsian tersebut masih banyak kekurangan seperti kurangnya selimut, kesediaan sembako serta obat-obatan.

Usai menerima bantuan, Kepala Desa Narmada, Lombok Barat, NTB Agus Sutomo turut senang, sekaligus bangga atas kepedulian DPR RI dalam membantu korban gempa di Lombok. Terlebih sumber bantuan ini diperoleh secara sumbangan sukarela antar Anggota MKD DPR RI. ■ hs/sf

Berbagai Lomba Warnai Puncak Perayaan HUT DPR oleh PIA DPR

Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI menggelar berbagai lomba yang melibatkan seluruh anggota keluarga di Kesetjenan DPR RI sebagai puncak perayaan HUT ke-73 DPR RI. Ketua Umum PIA DPR RI Ibu Bambang Soesatyo mengatakan, perlombaan ini digelar agar seluruh peserta lomba merasakan kebahagiaan dan kegembiraan.

“ Kami menggelar lomba-lomba yang melibatkan ibu-ibu, bapak-bapak dan juga anak-anak. Dengan maksud agar di puncak perayaan HUT DPR RI ke-73 tahun ini semua dapat merasakan kegembiraan dan kebahagiaan yang sama,” ujar Ibu Bamsuet kepada wartawan di sela-sela lomba, di Gedung Nusantara V DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (15/9).

Khusus untuk ibu-ibu, lanjut Ibu Bamsuet, disediakan lomba menghias tumpeng, lomba Tari Maumere, dan lomba peragaan busana. Sedangkan bapak-bapak, bisa mengikuti lomba tenis meja dan lomba tarik tambang. Sementara untuk anak-anak, selain bisa mengikuti lomba mewarnai, juga disediakan berbagai permainan yang melatih keterampilan fisik dan non fisik.

“Saya mengucapkan terima kasih atas peran serta semua pihak, seluruh

anggota PIA DPR RI, khususnya kepada panitia yang sudah berusaha menggelar berbagai acara yang ada dalam rangkaian peringatan HUT DPR RI ini. Mulai dari donor darah, bansos ke Lombok, sampai puncaknya hari ini dengan berbagai lomba,” jelas Ibu Bamsuet.

Ia berharap, berbagai acara yang sudah terlaksana dengan baik ini semakin mempererat tali silaturahmi, baik antar sesama Anggota PIA DPR RI maupun seluruh staf dan karyawan di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Acara yang dipandu oleh mantan artis cilik Tina Toon dan MC kondang yang juga seorang Anggota DPR RI Nico Siahaan ini juga dimeriahkan oleh penampilan beberapa artis ibukota, seperti Andre Hehanusa, Lita Zein dan Elfa's Singer, serta artis cilik berbakat Alisa Adna.

Ditambahkan Wakil Ketua PIA DPR RI Grace Fadli Zon, selain berbagai acara hiburan tersebut, PIA DPR RI juga memberikan bantuan pendidikan kepada beberapa anak berprestasi dari keluarga pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Hal ini menurut Grace sebagai salah satu bukti kepedulian PIA DPR RI terhadap sesama, khususnya pendidikan bagi anak bangsa.

Terpilih tiga anak yang mendapatkan bantuan pendidikan, yaitu Ika Noviyanti, siswi kelas 2 SMPN 101 Jakarta. Ika adalah putri dari Bapak M. Edo, salah satu *cleaning service* di DPR RI. Yang kedua adalah Ratu Restu Ayu, siswa kelas 3 SMPN 1 Jaktim. Ratu adalah putri dari Restu Sigit Pratowo, pegawai di DPR RI. Yang ketiga Amanda Martha Liyani, siswi kelas 3 SMPN 16 Jakarta. Amanda adalah putri Achmad Yani yang juga merupakan pegawai *cleaning service* di DPR.

“Bukan hal yg mudah bagi kami untuk menentukan tiga anak yang paling berhak menerima bantuan pendidikan. Karena semua anak yang mengajukan adalah anak-anak para pegawai yang sangat berprestasi. Namun berdasarkan berbagai persyaratan, akhirnya bantuan bea siswa kami berikan kepada Ika, Ratu dan Amanda,” ungkap Grace.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT DPR RI Ike Soelistio mengaku tidak terlalu lama mempersiapkan acara puncak HUT DPR RI. Meski demikian, ia cukup gembira dengan kelancaran dan antusiasme seluruh peserta lomba, termasuk anggota PIA DPR RI sendiri.

Tidak lupa ia mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang lomba, dan khusus yang belum berkesempatan menjadi juara, ia menyarankan untuk terus berlatih, pasalnya PIA DPR berencana akan membuat acara serupa di tahun-tahun mendatang. ■ ayu/sf



PIA DPR RI menggelar berbagai lomba sebagai puncak perayaan HUT ke-73 DPR RI

Foto: Azka/rmi



Ketua Tim Kunjuran Kerja BURT DPR RI Elva Hartati memimpin Tim BURT meninjau sarana dan prasarana RS Siloam Hospitals Balikpapan, Kalimantan Timur.

BURT Tinjau Pelaksanaan Program Jamkestama Siloam Balikpapan

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau langsung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) di Rumah Sakit (RS) Siloam Hospitals Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Tinjauan ini untuk melihat langsung fasilitas layanan kesehatan bagi para Anggota DPR RI sebagai pemegang kartu layanan Jamkestama.

Ketua Tim Kunjuran Kerja BURT DPR RI Elva Hartati mengapresiasi kesiapan RS Siloam Balikpapan sebagai RS provider untuk memberi layanan terbaik bagi para Anggota DPR RI beserta keluarganya. Dari hasil peninjauan sejumlah fasilitas, ia menilai fasilitasnya tak kalah dengan RS Siloam di Jakarta.

“Program Jamkestama sudah cukup memadai. Kita sudah melihat semua fasilitas ruangan VVIP-nya bagus, sama seperti tempat Rumah Sakit Siloam yang ada di Jakarta,” kata Elva saat

memimpin dialog Tim Kunjuran Kerja BURT DPR RI dengan Direktur RS Siloam Balikpapan beserta jajarannya di ruang rapat RS Siloam Balikpapan, Kaltim, Senin (17/9).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menambahkan, Jasindo sebagai penyedia layanan Jamkestama para Anggota Dewan dan keluarganya harus memiliki *database*. RS Siloam Balikpapan harus menjadi contoh RS *provider* yang lain di seluruh Indonesia, karena juga sudah memiliki *database* Anggota DPR RI beserta keluarganya.

“RS Siloam Balikpapan ini memiliki *database* seluruh Anggota DPR RI 560 orang beserta keluarganya. Sehingga apabila sakit tiba-tiba dan tidak membawa Kartu Jasindo, tinggal sebut nama langsung klik otomatis akan muncul namanya,” imbuh politisi dapil Bengkulu itu.

Di tempat yang sama, Direktur Siloam Hospitals Balikpapan Daniel Poluan mengatakan, pihaknya sudah mendengar langsung keinginan pihak BURT DPR RI, salah satunya mengenai kecepatan pelayanan dan tidak mempersulit proses administrasi.

“*Database* sudah ada, tapi data rekam medis tentu rahasia. Jasindo selalu *update* setiap kali ada perubahan data dengan menunjukkan KTP atau ID yang lain, itu sudah membuktikan siapa yang datang dan kami akan langsung memproses,” jelas Daniel. ■ *afr/sf*



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meninjau stand Hunian Sementara (Huntara) usai membuka pameran “DPR Peduli Huntara For NTB”, di Gedung DPR RI, Kamis (20/9) Foto: Runi/rni



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menghadiri Parlemen Remaja 2018, yang mengusung tema “Pemuda di Persimpangan Teknologi Informasi”, di Gedung DPR RI, Kamis, (20/9) Foto: Kresno/rni



Tim Monitoring Bagian Penerbitan Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI meninjau distribusi Majalah dan Buletin Parlemen di RS Harapan Kita, Jakarta, Rabu(19/9) Foto: Mastur/rni